

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti terdapat dalam dasar negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pembukaan dilimpahkan kepada seluruh warga negara. "... dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Hal ini memuat amanat tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa, yaitu: pertama, bahwa persatuan bangsa harus dijaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh; kedua, kekuasaan tertinggi atas pemerintahan adalah rakyat, sehingga kedaulatan negara harus dijaga oleh seluruh warga bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah; ketiga, dalam upaya mencapai kesejahteraan, impiannya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Pada kenyataannya, saat ini kondisi penyelenggaraan pertanggungjawaban pertahanan dan keamanan negara cenderung hanya ditanggung oleh lembaga di bidang pertahanan, kesadaran bela negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat (Al Syahrin, 2018). Sehingga pertahanan negara belum maksimal dilakukan, karena konsep pertahanan semesta yang dianut oleh Indonesia belum maksimal didukung oleh seluruh pihak.

Suatu pemerintahan negara Indonesia dapat terformulasikan berdasarkan nilai keinginan bangsa Indonesia, seperti yang tersebut pada alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berarti: pertama, dibutuhkan situasi dan kondisi yang mampu memberikan jaminan terlaksananya proses total dalam mencapai tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional dengan pembangunan nasional; Kedua, memberikan kebebasan semua warga negara Indonesia dari kekurangan dan ketidaktahuan di mana akan terjadi dengan tidak adanya situasi dan kondisi yang aman dan terjaga dengan baik; Ketiga, Keberadaan Indonesia di kancah internasional harus dapat berperan aktif dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia yang harmonis, serasi, dan seimbang dalam hubungan internasional. Hal tersebut merupakan tujuan nasional yang pada intinya menunjukkan adanya saling ketergantungan antara kesejahteraan dan keamanan nasional. Keamanan nasional yang terjamin akan mewujudkan Kesejahteraan nasional, sedangkan sebaliknya juga apabila kesejahteraan nasional meningkat, maka keamanan nasional juga terjamin kondusif dan dinamis, Keharmonisan antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Kenyataannya, kondisi keamanan nasional dan kesejahteraan nasional saat ini terkesan timpang di mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, di sisi lain urusan keamanan nasional belum maksimal menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan sehingga faktor-faktor tersebut menjadi permasalahan yang harus dikaji lebih lanjut, keseimbangan ini dapat mewujudkan tujuan nasional. Pentingnya persatuan nasional sebagai kunci untuk menjaga keselamatan bangsa (Al Syahrin, 2018). dengan demikian, antara kondisi ideal yang diharapkan untuk mencapai keamanan nasional belum tercapai.

Ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional saat ini sangat kompleks. Aspek ancaman semakin kompleks dengan dinamika kerentanan yang semakin sulit diprediksi. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara merupakan pedoman dalam mempersiapkan pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah,

dan melindungi segenap bangsa, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. Untuk merealisasikan arah dan tujuan kebijakan pertahanan negara, perlu dirumuskan strategi untuk membangun dan meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga guna mengantisipasi segala ancaman yang ada baik militer maupun nonmiliter sehingga menimbulkan rasa kebersamaan keamanan bagi masyarakat, serta membangun pertahanan dan stabilitas keamanan negara. Namun, kondisi tersebut tidak mudah dicapai karena dalam pelaksanaannya masih sulit untuk mencapai sinergitas antara kementerian dan lembaga baik dalam hal komunikasi dan koordinasi. Sehingga, persoalan ini masih menjadi tugas yang menunggu untuk segera diselesaikan.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disampaikan bahwa salah satu asset penting dalam upaya pertahanan negara yang bersifat universal adalah integrasi antara kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang secara sinergis merupakan upaya pertahanan negara. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Ketersediaan komponen-komponen sejak awal serta pengerahannya oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diperuntukkan memperkuat komponen utama. Penguatan pertahanan nirmiliter diampu oleh Kementerian dan Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama. Kementerian/Lembaga akan didukung oleh unsur kekuatan bangsa lainnya. Pada pokoknya kekuatan rakyat merupakan pertahanan nirmiliter yang telah dilembagakan sesuai peran, tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter harus dapat disinergi sesuai dengan jiwa dan semangat persatuan TNI dan rakyat, (Kemhan: 2015). Komponen komponen tersebut harus dapat bersinergi dan kolaborasi dengan baik dalam pertahanan negara, meskipun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal karena belum ada konsolidasi seluruh

komponen bangsa dalam forum bela negara.

Prinsip utama kedaulatan adalah tanggung jawab (*responsibility*), sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan standar peradaban internasional (*civilization standard*). Ketiga prinsip ini diwujudkan dalam kemauan dan kemampuan negara untuk menjamin kebijakan yang baik dalam melaksanakan hubungan investasi asing dengan investor asing dan negara mitra, (Prabowo, 2013). Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang diuji dengan berbagai ancaman, salah satunya dapat dipicu oleh banyaknya batas wilayah yang belum terselesaikan sehingga mengakibatkan konflik dengan negara tetangga. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional UNCLOS 1982, dan sebagai bukti adanya negara kepulauan dengan hak eksklusifnya, sejalan dengan itu Indonesia sangat rentan terhadap kedaulatannya.

Pemahaman tentang dinamika lingkungan strategis merupakan faktor penting dalam perumusan kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Tantangan yang ada pada abad 21 atau dinamika lingkungan strategis global dalam hal ini antara lain ancaman militer, ancaman nonmiliter dan tantangan yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Sishankamrata yang dibangun perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman di abad ke-21. Ancaman militer dalam dinamika lingkungan strategis global antara lain: terkait keamanan di Asia Pasifik; masalah Laut China Selatan; ancaman militer sebagai kelanjutan dari masalah persaingan AS-China; persaingan memperebutkan modernisasi kekuatan militer; konflik intra dan internasional. Sedangkan ancaman non-militer meliputi: pandemi Covid-19; pejuang asing yang kembali dari terorisme; ancaman kontemporer; pengembangan bidang Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir dan bahan peledak (CBRNE); kejahatan dunia maya; bencana alam; dan ketahanan pangan dan energi (Al Syahrin, 2018). Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi ancaman ini sejak dini. Kementerian Pertahanan dan TNI

dalam hal ini tidak akan dapat bertindak maksimal tanpa partisipasi dan dukungan Kementerian dan Lembaga terkait mengingat banyaknya tantangan dan luasnya wilayah Indonesia.

Partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam masalah konflik yang tidak surut di Laut China Selatan sangat diharapkan. Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai negara mediator tetapi juga diharapkan menjadi negara yang aktif untuk mencegah aktifitas negeri Tirai Bambu itu yang bertujuan untuk memperluas wilayah yurisdiksinya secara sepihak. Sangat diperlukan kerja sama dan diplomasi yang baik dengan negara-negara Kawasan khususnya di Asia Tenggara, tidak terkecuali hubungan bilateral yang baik dengan negara penuntut, yakni China, harus ditingkatkan. Hal tersebut merupakan cara awal yang dapat dilakukan untuk menghindari gesekan lebih lanjut di wilayah perairan. Dasar untuk meningkatkan penguatan pertahanan salah satunya adalah upaya diplomasi yang merupakan cara paling bijak untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Selain itu secara internal pemerintah Indonesia juga harus melindungi armada tempurnya di laut, darat, dan udara dalam rangka menjaga kedaulatan perairan dan pulau terluar. Terkadang hal ini dapat menimbulkan bentrokan atau konflik fisik antar negara. (Haryanto & Darmawan, 2017).

Masa pandemi Covid-19 tidak menurunkan niatan Amerika Serikat (AS) dan China untuk bersaing mengirimkan peralatan militernya di kawasan Laut China Selatan, sengketa yang hadir antara kedua negara dikhawatirkan bisa berubah menjadi Perang Dingin hingga Perang Dunia III. Hal tersebut karena kedua negara tidak hanya berselisih soal COVID-19, tetapi juga banyak hal lainnya, termasuk dalam perang dagang, persaingan teknologi pertahanan, persaingan ekonomi, dan persaingan politik. Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China masih menyisakan sejumlah celah. Masalah seperti perampokan dunia maya, keamanan, dan standardisasi, tidak tersentuh oleh Perjanjian Perdagangan AS-China dan dapat menjadi sumber masalah di masa

depan. (Haryanto & Darmawan, 2017).

Konflik di kedua negara juga cukup luas, mulai dari bidang ekonomi hingga politik, seperti permasalahan antara China-Taiwan. Sebagaimana diketahui, China menganggap Taiwan sebagai provinsinya dan merupakan bagian dari negara China, sedangkan Taiwan menganggap dirinya berdiri sendiri, sehingga hal ini menimbulkan ketegangan diantara kedua negara. Sementara Amerika Serikat adalah teman terpenting Taiwan, dan satu-satunya sekutunya. Pada awal 2021, pemerintah China mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan Penjaga Pantai China untuk menembak jatuh kapal asing yang melindungi wilayah Laut China Selatan yang diklaim China sebagai "daerah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing zone*)" berdasarkan "sembilan garis putus-putus (*nine dash line*)". Agresivitas China di Laut China Selatan telah menjadi concern baru.

Klaim teritorial agresif China di Laut China Selatan terus menjadi sumber perselisihan politik dan konflik militer di seluruh Asia-Pasifik, dengan aturan keterlibatan yang sebagian besar didikte oleh China, menyerukan tidak adanya intervensi militer AS. Stephen Burgess menunjukkan banyak konsekuensi dari "konflik tingkat rendah" antara China dan Vietnam selama Pertempuran Paracels pada tahun 1974 dan perselisihan berikutnya di Laut China Selatan pada tahun 1979, 1988 dan 2014. Dalam sebuah wawancara tahun 2019 dengan pejabat Kedutaan Besar AS di Hanoi, Burgess mencatat bahwa karena "kemitraan strategis" antara Vietnam dan Amerika Serikat saat ini memiliki batas, Vietnam harus terus menghadapi China di Paracel dan Spratly hampir sendirian. (Burgess, 2020)

Sementara pesaingnya, Amerika Serikat tidak tinggal diam, Amerika Serikat yang "menyeimbangkan kembali" Asia harus semakin menegaskan keunggulan militernya di Laut China Selatan dengan terus melibatkan dan memanfaatkan kesepakatan kerja sama keamanan regional dan persaingan antar anggota ASEAN untuk melawan

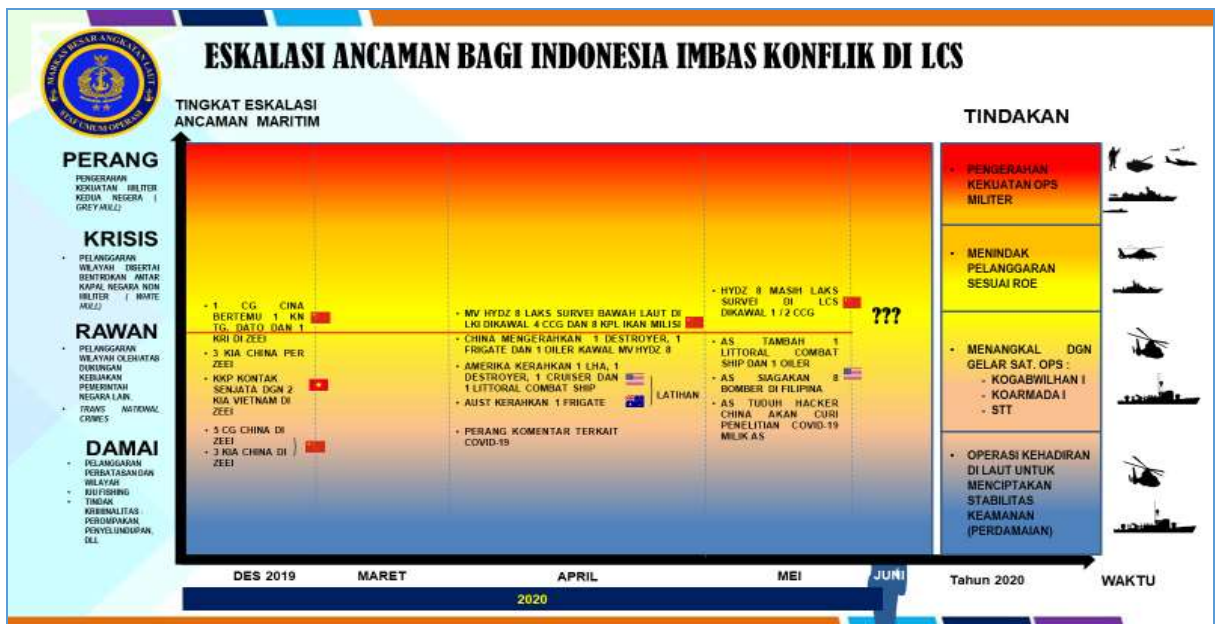
China. Hal ini dibuktikan dengan latihan maritim bersama AS-ASEAN baru-baru ini, di mana Amerika Serikat melakukan latihan bersama yang melibatkan militer Thailand, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Latihan ini sangat penting karena klaim China di Laut China Selatan tumpang tindih dengan klaim Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei. Selain itu karena angkatan laut China, Amerika Serikat, dan Jepang serta negara-negara Asia Tenggara secara teratur beroperasi di perairan yang disengketakan (Jhonson, 2019).

Kawasan Laut China Selatan telah menjadi fokus dunia internasional dan telah menjadi perbincangan panas dan strategis dimana kawasan tersebut merupakan laut dengan potensi yang sangat besar karena di dalamnya terdapat minyak dan gas bumi dan disamping itu juga berperan sangat penting sebagai distribusi saluran minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Nicky C. Cardenas (2020) dalam penelitiannya mengatakan, dampak persaingan militer antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan dalam kaitannya dengan keamanan Asia Tenggara. Secara khusus, ini berfokus pada implikasi militerisasi modern China yang berkelanjutan di Laut China Selatan, yang dibuktikan dengan pembangunan instalasi militernya di pulau-pulau dan terumbu buatan. Konflik mengenai kebebasan navigasi dan militerisasi antara Amerika Serikat dan China di perairan strategis di mana angkatan laut Asia Tenggara beroperasi telah meningkatkan ketegangan dan membahayakan peran ASEAN dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Selain itu, klaim China yang tumpang tindih atas Kepulauan Paracel dan Spratly telah membahayakan keselamatan dan keamanan komunitas ASEAN, terutama karena China menjadi lebih agresif dalam klaimnya atas Taiwan.

Dengan demikian, konflik di kawasan sengketa Laut China Selatan berpotensi menjadi ancaman pada keamanan regional dan nasional, beberapa alasannya diantaranya adalah: pertama, sengketa ini

melibatkan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu: Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan China; Kedua, negara yang mengklaim dalam wilayah Laut China Selatan tidak ragu-ragu untuk menggunakan peralatan militer seperti kapal perang ke kawasan tersebut guna mendukung klaim hak mereka atas wilayah yurisdiksi mereka; Ketiga, tidak hanya negara klaiman yang berselisih, tetapi negara besar yang merasa kepentingan nasionalnya terganggu ikut serta dalam konflik tersebut; Keempat, sampai saat ini tidak ada atau belum ditemukan instrumen politik yang dapat dipakai dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan.

Dalam menyikapi konflik yang terjadi di LCS, TNI AL membagi eskalasi menjadi beberapa tahap, yaitu Damai, Rawan, Krisis, Perang. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kondisi di LCS memasuki tahap rawan yang terlihat semakin seringnya terjadi pelanggaran wilayah yang dilaksanakan oleh unsur negara lain, seperti kapal-kapal China Coast Guard (CCG), kapal US Navy, yang direstui oleh otoritas pemerintah setempat. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar K/L baik unsur di lapangan, maupun yang dilaksanakan oleh staf pusat serta pendekatan pada semua bidang, seperti bidang Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME). Berikut gambaran Eskalasi ancaman bagi Indonesia imbas konflik LCS



**Gambar 1. 1 Eskalasi ancaman bagi indonesia impbas konflik LCS**

(Sumber: Mabes TNI AL)

Konsep baru yang diterapkan oleh China yaitu *Blue Sea Campaign* 2020 tentang penegakan hukum di Laut China Selatan mulai tanggal 1 April - 29 November 2020 yang menghadirkan kapal induk, kapal perusak, dan kapal penjaga pantai serta pembentukan dua distrik baru di Laut China Selatan, yaitu Xisha dan Sansha pada 18 April 2020. China akan menegakkan kedaulatan dan hukumnya serta menindak aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang dianggap salah oleh China. China juga akan melakukan apa saja untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingannya di Laut China Selatan. Disisi yang lain dampak dari kampanye *American Freedom of Navigation* yang menghadirkan satgas yaitu kapal induk dan kapal destroyer ini membuka kemungkinan konflik antara dua kekuatan besar di Laut China Selatan.

Berikut adalah tabel persaingan antara Amerika dan China di Laut China Selatan:

**Table 1.1 Persaingan Amerika dan China**

<b>Aspek Persaingan</b>	<b>Amerika</b>	<b>China</b>
<b>Ekonomi</b>	Kepentingan AS dilihat dari perspektif kebutuhan negara besar itu atas Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dan kawasan untuk mendukung keamanan energi dan kepentingan nasionalnya secara menyeluruh, termasuk dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan.	Pemerintah RRC mengeluarkan pernyataan keras kepada negara-negara pengklaim kedaulatan atas Laut China Selatan untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan mineral di kawasan perairan LCS.
<b>Politik</b>	Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa-Asia dan Amerika-Asia serta sebaliknya. Melalui wilayah perairan negara-negara di paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Pasifik, maka selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut China Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS), berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan	Pemerintah RRC melakukan klaim absolut yang mengacaukan tertib atau <i>security order</i> yang ada selama ini yang menjamin stabilitas interaksi dan sistem. Sementara, masa depan ( <i>prospek</i> ) hukum internasional yang berlaku di kawasan menjadi semakin dipertanyakan oleh para pemangku kepentingan
<b>Pertahanan</b>	Amerika Serikat memandang tinggi dominasi maritim, komitmen keamanan dan kebebasan navigasi kepada negara-negara kawasan.	China sebagai negara pesisir terbesar pada kawasan tersebut memiliki kepentingan yang dipertaruhkan terutama mengenai kedaulatan teritorial, jalur komunikasi, dan perairan yurisdiksi

(Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber)

Secara umum, konflik kepentingan AS dan China di LCS bukanlah hal yang baru. Napoleon pernah memprediksikan kebangkitan China, *“Two centuries ago Napoleon predicted the rise of China. Napoleon warned that the rise of China would shake the world. Once he stated: “Let China sleep, for when she wakes, she will shake the world” (Boyle, 2004). Global war will not take place, because both states are nuclear powers and have the capacity to destroy the world” (Valdai Club, 2016).*

Pengaruh dari dinamika konflik di Laut China Selatan sangat kuat mempengaruhi proses penanganan dan penyelesaian konflik itu sendiri. Konflik tersebut menjadi ancaman dan tantangan bagi stabilitas keamanan regional, dan tidak terkecuali bagi Indonesia yang mendeklarasikan bukan sebagai negara klaiman dan tidak mengakui *unilateral claim* China *“Nine dotted line”*. Bagaimanapun Indonesia tidak ingin terlibat langsung dalam konflik Laut China Selatan, tetapi upaya-upaya untuk mengambil peran dalam penanganan konflik tersebut terus dilakukan. Karena sesuai amanat konstitusi, Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan perdamaian dunia

Dunia Internasional sangat paham bahwa keberadaan Laut China Selatan mempunyai arti yang penting dan strategis. Untuk itu sebagai negara terbesar di ASEAN, tidak bisa dipungkiri tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk ikut aktif dalam diplomasi pertahanan di Kawasan, walaupun telah ditegaskan bahwa posisi Indonesia tidak menuntut kepemilikan teritorial di Laut China Selatan. Banyak arti penting kawasan Laut China Selatan bagi dunia Internasional dan Indonesia, di antaranya adalah kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk wilayah Indonesia dari utara dan wilayah utara merupakan jalur yang disepakati oleh Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), untuk itu perlu jaminan keamanan di perairan tersebut.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat antusiasme Amerika dan China berlaga di Laut China Selatan,

perlombaan senjata dan kapal perang berlangsung di sana. Hal ini sangat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Menyikapi masalah ini tentunya tidak hanya menjadi masalah aparat keamanan, tetapi harus dipikirkan secara komprehensif dalam konsep yang lebih tinggi karena dampak dari kegiatan tersebut mengancam keamanan nasional Indonesia. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintahan dan rakyat Indonesia. Hingga saat ini, belum ada klausul dalam dokumen Rencana Strategis di Kementerian/Lembaga yang membahas antisipasi masalah tersebut. Hal ini dimungkinkan karena anggapan bahwa urusan pertahanan merupakan tanggung jawab TNI dan Kemhan. Sampai saat ini strategi mengantisipasi persaingan antara AS dan China di Laut China Selatan di Kementerian/Lembaga terkait belum ada, dan penerapannya belum terintegrasi antar komponen nasional.

Deteksi Dini dan Pencegahan Dini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan militer Indonesia dan pengamanan di Kepulauan Natuna, meningkatkan diplomasi preventif dengan negara-negara penuntut untuk mengurangi konflik, meningkatkan pengelolaan perbatasan dan kegiatan di perairan Natuna, eksplorasi sumber daya alam yang terkontrol, dan melaksanakan operasi laut yang diperlukan dalam mengantisipasi sengketa wilayah di Laut China Selatan (Zhuwitra, 2018). Hal ini belum terintegrasi deteksi dini dari pemerintah dalam soal persaingan AS-China di Laut China Selatan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Komunikasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga saat ini belum menunjukkan kerjasama yang baik, masih terlihat adanya ego sektoral pada masing-masing institusi serta *overlapping* tugas dan kewenangannya. Indonesia bukan merupakan negara klaiman di Laut China Selatan tetapi apabila terjadi eskalasi yang meningkat di Laut China Selatan akan terkena *spill over*/tumpahan dari persaingan AS-China. Persaingan AS-China diawali dari perang dagang sampai dengan perlombaan kekuatan militernya di Laut China Selatan, hal tersebut

membahayakan stabilitas keamanan nasional, dengan klaim unilateral “*nine dotted line*” serta konsep *Belt Road Initiatives* (BRI) nya China yang berseberangan dengan konsep *Freedom of Navigation Amerika* serta konsep Indo Pasifik membuat Indonesia harus bersikap netral sesuai politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Konsep keamanan nasional saat ini dirasa masih terdapat keraguan/ambigu dalam kewenangan dan tugas serta organisasinya, terutama diantara aparat keamanan. Stabilitas keamanan saat ini yang rawan dikarenakan adanya perselisihan, sengketa, konflik yang dikuatkan akan mengakibatkan perang. Kurangnya deteksi dini dari pemerintah dalam masalah perlombaan kekuatan militer dan persaingan AS- China di Laut China Selatan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia. (Pertahanan, 2013)

Koordinasi yang melibatkan beberapa K/L terkait selama ini dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Tingkat Menteri, rapat ini dilaksanakan hanya disaat ada permasalahan yang berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Kegiatan yang dilaporkan masing-masing K/L cenderung egosentris dan tidak tersinergi dengan K/L lain, sehingga terlihat belum adanya perencanaan sinergi yang terintegrasi dan terstruktur dalam komando yang sama, dengan visi dan misi yang sama. Selain itu belum adanya evaluasi kegiatan terkait antisipasi konflik di LCS, sehingga program yang dilaksanakan belum terukur, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Kondisi di atas memiliki banyak kekurangan khususnya dalam hal koordinasi dan sinergi antara Kementerian/Lembaga serta institusi yang terkait, masing-masing instansi hanya mementingkan kepentingan sectoral. Kelemahan Indonesia dalam koordinasi dan sinergitas tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh negara-negara yang ingin mengintervensi Indonesia. Hal ini secara nyata menjadi ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Berdasarkan kebutuhan,

perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan penjagaan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada membutuhkan dan peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyiapan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Dalam mewujudkan keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif, bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI sebagai kekuatan utama, tetapi juga melibatkan instansi pemerintah terkait dan peran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Ego sektoral di Kementerian/Lembaga terlihat disaat penyelesaian suatu masalah yang tidak terkoordinasi. Salah satu contoh, saat ini Bakamla telah mendapat kewenangan sebagai *coast guard* Indonesia, tetapi lembaga yang lain yang mempunyai kewenangan yang sama tidak berkenan/menolak untuk berada dibawah koordinasi Bakamla, sehingga saat terjadi permasalahan/pelanggaran kapal asing pada *grey area* (perairan yang belum disepakati batasnya) belum ada standard perlakuan yang baku (SOP) nya. Sering kali pihak asing melakukan pelanggaran dan memanfaatkan kondisi internal yaitu kurang adanya koordinasi dan sinergi antar instansi kelautan di Indonesia.

Menindaklanjuti persaingan kekuatan militer dan persaingan AS-China di LCS dengan Mendefinisikan strategi dalam dua cara: Secara konseptual, kami mendefinisikan strategi sinergitas lembaga sebagai hubungan antara cara dan sarana dalam menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dengan tujuan penjagaan stabilitas keamanan Nasional. Seni strategis sinergitas Kementerian/Lembaga,

secara luas didefinisikan bahwa sinergitas Kementerian/Lembaga merupakan perumusan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, dan penerapan *Ends* (tujuan) sebagai akhir Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional, cara yaitu sinergitas Kementerian/Lembaga, dan sarana (sumber daya) untuk menjaga kepentingan stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan permasalahan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengambil judul “Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional)”

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus**

Dalam penelitian dengan judul Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional) ini, peneliti akan fokus pada sinergitas K/L dalam megantisipasi persaingan AS-China di LCS. Hal tersebut ditentukan dengan pemikiran bahwa strategi untuk mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan adalah salah satunya dengan sinergitas Kementeriann/Lembaga dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada fokus diatas akan menjadi sub fokus dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian juga akan diarahkan pada keterlibatan beberapa Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan. Keterlibatan tersebut dapat berupa program-program dalam rencana strategi Kementerian/Lembaga yang terfokus pada kegiatan penjagaan stabilitas keamanan nasional.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah disebutkan dalam pendahuluan yaitu belum adanya strategi Kementerian/Lembaga dalam pengembangan

penjagaan stabilitas nasional, kurangnya sinergitas Kementerian/Lembaga dalam merespon konflik yang terjadi di Laut China Selatan di mana terjadi perlombaan kekuatan militer diantara major power, yang akan berdampak pada kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Strategi yang selama ini ditekankan hanya pada tingkat Kementerian Pertahanan dan belum merupakan strategi yang terintegrasi di semua stakes holder Kementerian/Lembaga yang terkait. Sehingga terlihat permasalahan konflik dan persaingan AS-China di Laut China Selatan ini hanya merupakan tugas dari Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI sebagai pelaksana.

Berdasarkan kesimpulan permasalahan pada pendahuluan maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
- b. Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?
- c. Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam strategi sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi pada pembentukan Renstra Kementerian/Lembaga dalam pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional
- b. Menganalisis sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China

Selatan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.

- c. Merumuskan strategi sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap kajian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat ini dapat bersifat teoritis dan praktis. Bagi penelitian kualitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi juga tidak memungkiri manfaat praktisnya untuk menyelesaikan masalah. Jika peneliti kualitatif dapat menemukan suatu teori maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala (Siyoto & Sodik, 2015).

Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mendeskripsikan manfaat penelitian ke dalam dua bagian yaitu :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan perspektif analisis yang mendalam sebagai hasil kajian yang berkaitan dengan pengembangan strategi di Laut China Selatan untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional;
- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademis dalam meningkatkan strategi keamanan tentang pengembangan strategi di Laut China Selatan untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China dalam rangka stabilitas keamanan nasional; dan
- c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan suatu kebijakan nasional yang partisipatif dan efektif serta efisien dalam pengembangan program.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bentuk rekomendasi yang dilengkapi dengan sajian data dan informasi yang aktual bagi pembuat kebijakan (*policy maker*) serta para pelaku (*stakes holder*) dalam pengembangan strategi di Laut China Selatan untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China dalam rangka penjagaan stabilitas keamanan nasional.